

KOMITMEN 3
Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen

Komitmen 3 ini mengacu pada penguatan keterbukaan informasi publik di parlemen(DPR RI). PPID selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi akan melaksanakan workshop, pemeringkatan, dan mengelola website. Kegiatan Penyusunan tools pemeringkatan, mengundang IPC akan dilaksanakan pada 5 Maret 2019, Rapat progres website baru dengan BDTI akan dilaksanakan pada 6 Maret 2019, dan di minggu ke-2 bulan Maret 2019 akan dilaksanakan pameran Legal Expo Manado. Sedangkan Workshop/FGD akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Maret 2019(tanggal belum fix), Workshop tsb dilakukan dengan Kasel AKD, Sekertariat: "Pembuatan pedoman pengelolaan informasi publik menyesuaikan dengan: SOP PPID yang ada". Pengumuman Website baru dan pemeringkatan akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2019(tanggal belum fix).

EVENT	BULAN																ACTORS INVOLVED																																
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL					MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Workshop tentang pedoman manajemen informasi publik <i>(November 2018 – July 2019)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 2. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen 3. Kepala Biro Sesi 1 4. Kepala Biro Sesi 2 5. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat 6. Kepala Divisi Organisasi, Sistem, dan Prosedur 7. Kepala Divisi Arsip dan Museum 8. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik 9. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat				
Pengembangan alat evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 2. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen 3. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat 4. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik.				
Implementasi alat evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 2. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen 3. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat. 4. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik.				
Peluncuran/peresmian alat peringkat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 2. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen 3. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat 4. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik 5. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat				
Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <i>(October 2018 – July 2020)</i>																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Komite Legislasi 2. Pusat Penyusunan Legislatif 3. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 4. Divisi Hubungan Masyarakat				

KOMITMEN 4
Perumusan Roadmap Open Parliament Indonesia

EVENT	BULAN																ACTORS INVOLVED																																
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL					MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Survei dasar tentang konstituen <i>(October 2018 – September 2019)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Kepala Badan Keahlian DPR 3. Wakil Sekretaris Jenderal tentang Sesi 4. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 5. Kepala Biro untuk Berita Parlemen dan Komunikasi Media 6. Kepala Biro Sesi 1 7. Kepala Biro Sesi 2 8. Kepala Pusat Penelitian 9. Peneliti 10. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat 11. IPC(Indonesia Parliamentary Center) 12. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) 13. WFD(Westminster Foundation for Democracy)				
Perumusan dokumen roadmap <i>(January 2018 – August 2020)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kepala Badan Keahlian DPR 2. Wakil Sekretaris Jenderal tentang Sesi 3. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 4. Kepala Biro Komite untuk Kerja Sama Antar Parlemen 5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Parlemen 6. Kepala Biro Sesi 1 7. Kepala Biro Sesi 2 8. Kepala Pusat Penelitian 9. Peneliti 10. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat 11. IPC(Indonesia Parliamentary Center) 12. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) 13. WFD(Westminster Foundation for Democracy)				
Diskusi tentang Roadmap Open Parliament Indonesia <i>(October 2018 – June/July 2020)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Pimpinan DPR RI 2. Komite Rumah Tangga 3. Komite untuk Kerjasama Antar-Parlemen 4. Sekretaris Jenderal DPR RI 5. Kepala Badan Keahlian DPR 6. Biro Humas dan Komunikasi Parlemen 7. Biro Komite untuk Kerja Sama Antar Parlemen 8. Kepala Biro Sesi 1 9. Kepala Biro Sesi 2 10. Kepala Pusat Penelitian 11. Peneliti 12. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat 13. IPC(Indonesia Parliamentary Center) 14. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) 15. WFD(Westminster Foundation for Democracy)				

KOMITMEN 5

Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia

EVENT	BULAN																																																ACTORS INVOLVED							
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Perumusan makalah kebijakan tentang lembaga model OPI (November 2018 – April 2019)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	1. Pimpinan DPR RI 2. Komite untuk Kerjasama Antar-Parlemen 3. Sekjen DPR RI 4. Badan Keahlian DPR 5. Biro Kepemimpinan Parlemen 6. Biro untuk Kerjasama Antar-Parlemen	7. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 8. Pusat Penelitian 9. IPC (Indonesia Parliamentary Center) 10. WFD (Westminster Foundation for Democracy)		
Perumusan Surat Keputusan Struktur Organisasi Parlemen Terbuka Indonesia berdasarkan prinsip kolaborasi dan kreasi bersama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					1. Sekjen DPR RI 2. Badan Keahlian DPR 3. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Sesi 4. Biro Kepemimpinan Parlemen 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Parlemen	6. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 7. IPC (Indonesia Parliamentary Center)						
Perumusan mekanisme implementasi OPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					1. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Sesi 2. Biro Kepemimpinan Parlemen 3. Biro Humas dan Komunikasi Parlemen 4. Kepala Biro Sesi 1 5. Kepala Biro Sesi 2 6. Kepala Pusat Data dan Informasi	7. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat 8. Kepala Divisi Sistem Organisasi, dan Prosedur 9. Kepala Divisi Arsip dan Museum 10. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik 11. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat 12. Tim OPI						
Monitoring dan evaluasi									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Membuat laporan									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					1. Sekretariat OPI 2. Inspektur Jenderal							